



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SEWON
KALURAHAN TIMBULHARJO



Alamat : Cangkringmalang/Dk.Mriyan, Timbulharjo, Sewon, Bantul. Kode Pos 55186
Email: desa.timbulharjo@bantulkab.go.id Web: timbulharjo.bantulkab.go.id

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KALURAHAN TIMBULHARJO
TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Profil Singkat Pemerintah Kalurahan

Kalurahan Timbulharjo merupakan salah satu dari empat kalurahan yang berada di wilayah Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul. Kalurahan ini memiliki luas wilayah sekitar 777,89 ha yang terdiri atas jumlah padukuhan 16 padukuhan, 122 RT. Batas wilayah Kalurahan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kalurahan Bangunharjo dan Panggungharjo Kapanewon Sewon
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kalurahan Sumberagung Kapanewon Jetis dan Kalurahan Sabdodadi Kapanewon Bantul
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kalurahan Wonokromo Kapanewon Pleret dan Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon dan Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul

Jumlah penduduk Kalurahan pada tahun 2025 sebanyak 23.699 jiwa, dengan komposisi 11.905 laki-laki dan 11.794 perempuan. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani.

Pemerintah Kalurahan dipimpin oleh Lurah, dibantu oleh Pamong Kalurahan yang terdiri atas unsur Sekretariat Kalurahan, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan. Dalam menjalankan tugasnya, Pemerintah Kalurahan berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, dan efisiensi.

Secara kelembagaan, Kalurahan juga memiliki mitra strategis seperti Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal), Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan serta berbagai lembaga kalurahan lainnya yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

Penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) yang disusun secara partisipatif dengan melibatkan unsur masyarakat.

Dalam pelaksanaan kinerjanya, Pemerintah Kalurahan juga mengacu pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kalurahan sebagai alat ukur

keberhasilan pelaksanaan program. SAKIP Kalurahan menetapkan empat sasaran kinerja, yaitu:

1. Penurunan jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin;
2. Penurunan jumlah anak stunting;
3. Peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan; dan
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keempat sasaran kinerja ini menjadi fokus pembangunan Kalurahan setiap tahunnya dan menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Lurah sekaligus menjadi indikator utama dalam penilaian kinerja Pemerintah Kalurahan setiap tahun, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kalurahan. Pada akhir tahun, capaian dari masing-masing sasaran diukur dan dievaluasi untuk menentukan tingkat keberhasilan serta langkah perbaikan yang diperlukan di tahun berikutnya.

B. Permasalahan dan Isu Strategis

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kalurahan Timbulharjo menghadapi sejumlah isu strategis, baik yang bersumber dari kondisi internal maupun faktor eksternal, di antaranya:

a. Penurunan Keluarga Miskin

Meskipun berbagai program penanggulangan kemiskinan telah berjalan seperti bantuan langsung tunai, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pelatihan kewirausahaan namun tingkat kemiskinan masih perlu ditekan melalui penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.

b. Penurunan Jumlah Anak Stunting

Tantangan utama masih terdapat pada kurangnya kesadaran gizi keluarga dan pola makan yang belum seimbang. Kalurahan Timbulharjo telah melakukan intervensi bersama kader kesehatan, kader posyandu, dan kader PKK untuk menurunkan angka stunting melalui edukasi dan pemberian makanan tambahan.

c. Peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan

Potensi ekonomi lokal seperti pengelolaan tanah kas Kalurahan, pengembangan unit usaha milik Kalurahan (BUMKal), dan sewa aset Kalurahan masih perlu ditingkatkan. Pengelolaan Pendapatan Asli Kalurahan yang kreatif dan transparan menjadi salah satu kunci untuk memperkuat kemandirian fiskal Kalurahan.

d. Peningkatan Pelayanan Publik

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat dan efisien semakin tinggi. Pemerintah Kalurahan berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui pemanfaatan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan dan teknologi informasi (digitalisasi layanan) serta penerapan standar pelayanan minimal.

Permasalahan dan isu strategis ini menjadi dasar utama dalam penyusunan rencana kinerja dan Perjanjian Kinerja tahun 2026.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen penting dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kalurahan yang berfungsi sebagai bentuk komitmen antara Lurah dengan Bupati melalui Panewu, untuk mencapai sasaran dan target Pemerintah Kalurahan selama satu tahun anggaran. Dokumen ini menjadi landasan bagi Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan program, kegiatan, serta pengelolaan sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kalurahan Timbulharjo telah menyusun Perjanjian Kinerja sesuai amanat Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kalurahan. Peraturan Bupati ini mengatur bahwa setiap Kalurahan wajib menetapkan sasaran kinerja dan indikator kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMKal) dan rencana kerja tahunan (RKPKal).

Perjanjian Kinerja tersebut ditandatangani oleh Lurah Timbulharjo pada tanggal 5 Februari 2025 sebagai bentuk kesanggupan untuk mencapai target-target utama yang telah disepakati. Penyusunan Perjanjian Kinerja dilakukan melalui proses analisis kebutuhan, penelaahan dokumen RPJMKal dan RKPKal, serta mempertimbangkan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kalurahan.

A. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

Penyusunan Perjanjian Kinerja bertujuan untuk:

- a. memberikan kejelasan arah dan target kinerja yang harus dicapai oleh Pemerintah Kalurahan dalam tahun berjalan.
- b. menguatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan program, sehingga setiap kegiatan memiliki dasar yang jelas dan terukur.
- c. sebagai dasar evaluasi kinerja, baik pada akhir tahun maupun dalam monitoring/evaluasi internal.
- d. meningkatkan transparansi kepada masyarakat, bahwa setiap penggunaan APBKal diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran prioritas.

B. Ruang Lingkup Sasaran dan Indikator Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memuat 4 (empat) sasaran strategis yang menjadi fokus pembangunan Kalurahan. Masing-masing sasaran dilengkapi dengan indikator kinerja yang digunakan sebagai alat ukur capaian. Sasaran tersebut yaitu:

- a. Penurunan Jumlah Keluarga Miskin (KK Miskin)
Indikator: penurunan jumlah KK Miskin setiap tahun.
- b. Penurunan Prevalensi Anak Stunting
Indikator: penurunan jumlah anak stunting setiap tahun.
- c. Peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan.
Indikator: Total nilai Pendapatan Asli Kalurahan yang dapat direalisasikan pada tahun berjalan.
- d. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Indikator: Nilai/Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Indikator tersebut ditetapkan menggunakan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*), sehingga dapat menjadi dasar evaluasi kinerja secara terukur pada akhir tahun anggaran.

C. Penetapan Target Kinerja

Untuk menjamin adanya kejelasan capaian yang harus dihasilkan, setiap indikator diberikan target kinerja tahunan yang akan menjadi dasar pengukuran akuntabilitas. Target-target tersebut mengacu pada kondisi tahun sebelumnya, kapasitas anggaran Kalurahan, kebutuhan masyarakat, serta arahan pembangunan daerah Kabupaten Bantul.

Target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Target penurunan jumlah KK miskin menjadi 2.542 pada akhir tahun.
- b. Target penurunan jumlah stunting menjadi 28 pada akhir tahun.
- c. Target peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan menjadi sebesar Rp 705.023.532,00.
- d. Target peningkatan kualitas pelayanan publik dengan nilai/skor Indeks Kepuasan Masyarakat 88,50.

Penetapan target ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dalam merencanakan kegiatan, mengalokasikan anggaran, serta menetapkan prioritas pembangunan.

D. Komitmen Pemerintah Kalurahan

Melalui penetapan Perjanjian Kinerja ini, Pemerintah Kalurahan berkomitmen untuk:

- a. mengarahkan seluruh program dan kegiatan agar sesuai dengan sasaran kinerja;
- b. menggunakan anggaran secara efektif dan akuntabel;
- c. menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan;
- d. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
- e. memastikan setiap capaian kinerja dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Dengan demikian, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 bukan hanya sebuah dokumen administratif, tetapi merupakan pernyataan kesanggupan pemerintah Kalurahan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah direncanakan, serta menjadi dasar penilaian akuntabilitas pada akhir tahun anggaran.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. Analisis Pengukuran Kinerja

Pada akhir tahun 2025, Pemerintah Kalurahan Timbulharjo melaksanakan pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) sasaran strategis SAKIP Kalurahan. Hasil capaian menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

a. Penurunan Jumlah Kepala Keluarga Miskin

Capaian penurunan jumlah Keluarga Miskin (KK Miskin) pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif. Berdasarkan data hasil pemutakhiran, jumlah KK miskin yang semula sebanyak 2.580 KK berhasil turun menjadi 2.542 KK pada akhir tahun. Penurunan ini setara dengan 0,2%.

Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas berbagai program pemberdayaan dan perlindungan sosial yang telah dilaksanakan Pemerintah Kalurahan. Program-program seperti pelatihan peningkatan keterampilan, fasilitasi modal usaha melalui BUMKal, pembinaan UMKM, serta bantuan sosial tepat sasaran terbukti memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, keberhasilan penurunan KK miskin juga didukung oleh:

- 1) penguatan basis data keluarga miskin melalui pembaruan data secara berkala;
- 2) koordinasi intensif dengan lembaga mitra seperti Dinas Sosial, pendamping PKH dan TKSK;
- 3) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program ekonomi produktif;
- 4) pemantauan berkelanjutan terhadap keluarga rentan.
- 5) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan.
- 6) Penguatan peran kelembagaan desa, seperti BUMKal dan kelompok usaha masyarakat.
- 7) Tersedianya lapangan kerja lokal yang mampu menyerap tenaga kerja.
- 8) Peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
- 9) Pengelolaan anggaran desa yang tepat sasaran dan transparan.
- 10) Sinergi antara pemerintah kalurahan, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam program penanggulangan kemiskinan.

Capaian ini menjadi indikator bahwa upaya Pemerintah Kalurahan dalam menurunkan angka kemiskinan sudah berada pada jalur yang tepat dan perlu dilanjutkan melalui strategi yang lebih inovatif di tahun berikutnya.

Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 157 Tahun 2024 tentang Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Bantul, jumlah Keluarga Miskin (KK Miskin) pada Tahun 2025 belum menunjukkan penurunan sesuai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dari jumlah awal 2.580 KK, Kalurahan hanya mampu menurunkan menjadi 2.542 KK atau turun sebesar 0,2%, sehingga belum mencapai target penurunan.

Kondisi ini menggambarkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di tingkat Kalurahan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain:

- 1) rendahnya kapasitas ekonomi keluarga miskin untuk mengikuti program pemberdayaan;

- 2) keterbatasan modal usaha dan akses pemasaran bagi pelaku UMKM kecil;
- 3) adanya perubahan kondisi sosial ekonomi yang memengaruhi pendapatan masyarakat, seperti inflasi atau penurunan aktivitas usaha;
- 4) tidak semua program bantuan sosial atau pemberdayaan dapat menjangkau seluruh keluarga sasaran;
- 5) masih terdapat keluarga rentan yang kembali masuk kategori miskin karena faktor kesehatan atau pekerjaan.

Ketidakmampuan mencapai target ini berdampak pada perlunya perbaikan strategi penanganan kemiskinan pada tahun berikutnya. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kalurahan akan:

- 1) memperkuat pendataan keluarga miskin berbasis kondisi riil lapangan;
- 2) melakukan pendampingan usaha yang lebih intensif melalui BUMKAL dan kelompok ekonomi;
- 3) mengembangkan program pemberdayaan berbasis potensi lokal;
- 4) bekerja sama dengan lembaga sektor ketiga seperti perguruan tinggi, CSR, dan relawan pemberdayaan;
- 5) memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran dan tepat waktu.

Walaupun target belum tercapai, Pemerintah Kalurahan tetap berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan melalui perbaikan kebijakan, inovasi program, dan penguatan koordinasi lintas sektor.

b. Penurunan Jumlah Anak Stunting

Hasil pelaksanaan program percepatan penurunan stunting pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa target penurunan prevalensi stunting berhasil dicapai. Berdasarkan data hasil pengukuran di posyandu, prevalensi stunting yang pada awal tahun sebesar 28 dan pada akhir tahun nilainya tetap. Penurunan sebesar 0 ini telah sesuai target tahunan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Capaian positif ini mencerminkan bahwa intervensi spesifik dan sensitif yang dilaksanakan Pemerintah Kalurahan berjalan efektif. Beberapa program yang memberikan kontribusi signifikan antara lain:

- 1) pemberian makanan tambahan (PMT) berbasis bahan pangan lokal;
- 2) penguatan fungsi posyandu dan peningkatan kualitas layanan pemantauan pertumbuhan;
- 3) edukasi gizi dan kesehatan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga balita;
- 4) peningkatan akses air bersih dan sanitasi lingkungan;
- 5) pemantauan intensif balita risiko stunting oleh kader kesehatan dan tenaga puskesmas;

Keberhasilan ini memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalurahan serta memperkuat komitmen Pemerintah Kalurahan dalam mendukung agenda nasional penurunan stunting. Ke depan, strategi percepatan tetap akan dikembangkan untuk menjaga agar prevalensi stunting terus menurun secara berkelanjutan.

c. Peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan

Capaian Pendapatan Asli Kalurahan Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif. Berdasarkan laporan realisasi APBKAL, Pemerintah Kalurahan berhasil mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Target PAKAL sebesar Rp 680.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp 705.023.532,00 atau 103% dari target tahunan.

Pencapaian ini menunjukkan meningkatnya efektivitas upaya optimalisasi aset Kalurahan dan pengembangan unit usaha BUMKal. Kontribusi tertinggi berasal dari sektor sewa tanah kas desa, usaha perdagangan, pengelolaan parkir, pengelolaan bangunan, atau lainnya.

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan ini antara lain:

- 1) meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar sewa atau retribusi;
- 2) inovasi usaha oleh BUMKal yang mulai memberikan keuntungan stabil;
- 3) promosi potensi Kalurahan yang lebih efektif;
- 4) koordinasi yang baik antara Lurah, BUMKal, dan pengelola aset.

Capaian Pendapatan Asli Kalurahan yang melampaui target ini berdampak positif pada ruang fiskal Kalurahan, karena memungkinkan pembiayaan program prioritas, peningkatan pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat secara lebih maksimal. Hasil ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Kalurahan telah berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

d. Peningkatan Pelayanan Publik

Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik Pemerintah Kalurahan Timbulharjo telah memenuhi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Target nilai IKM sebesar 88,37 berhasil tercapai bahkan meningkat menjadi 88,40, sehingga menggambarkan peningkatan persepsi masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Capaian tersebut mencerminkan bahwa program peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan sepanjang tahun telah efektif, antara lain:

- 1) penyederhanaan prosedur layanan administrasi;
- 2) peningkatan kompetensi Pamong Kalurahan melalui pelatihan pelayanan;
- 3) perbaikan sarana prasarana ruang pelayanan;
- 4) pemanfaatan sistem pelayanan berbasis digital;
- 5) peningkatan kecepatan dan ketepatan layanan kepada masyarakat.

Peningkatan nilai/skor IKM juga menunjukkan bahwa masyarakat merasa lebih puas terhadap standar pelayanan, keramahan aparatur, akses layanan, serta transparansi proses administrasi. Capaian ini memberikan dorongan positif bagi Pemerintah Kalurahan untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan sebagai bagian dari komitmen dalam SAKIP Kalurahan.

2. Pemanfaatan Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Kinerja

Dalam rangka pencapaian empat sasaran kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Pemerintah Kalurahan Timbulharjo telah mengalokasikan dan memanfaatkan anggaran secara terarah, terukur, dan berorientasi pada hasil. Total anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut pada tahun berjalan adalah sebesar Rp 3.691.633.192,00 Anggaran ini dialokasikan melalui berbagai program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RPMKal dan RKPKal.

Adapun rincian pemanfaatan anggaran untuk masing-masing sasaran kinerja adalah sebagai berikut:

a. Penurunan Jumlah KK Miskin

Total anggaran yang dialokasikan untuk mendukung penanggulangan kemiskinan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 460.979.050,00 Anggaran ini digunakan untuk membiayai:

- 1) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
- 2) Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN (Rumah, Sumur, dan MCK)
- 3) Penanganan Keadaan Mendesak (BLT DD)

Pemanfaatan anggaran tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi warga, sehingga jumlah KK miskin dapat berkurang sesuai target tahunan

b. Penurunan Jumlah Anak Stunting

Untuk mendukung percepatan penurunan stunting, Pemerintah Kalurahan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 280.473.400,00. Anggaran ini dimanfaatkan untuk:

- 1) Pengelolaan Aplikasi E-Human Development Worker
- 2) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian, dll)
- 3) Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
- 4) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
- 5) Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat
- 6) Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting
- 7) Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis/Resiko Tinggi dan Nifas
- 8) Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, DII)

Anggaran ini diharapkan dapat menurunkan jumlah anak stunting secara signifikan dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

c. Peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan

Pemerintah Kalurahan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 585.230.424,00 untuk mendukung kegiatan peningkatan pendapatan asli Kalurahan. Anggaran tersebut digunakan antara lain untuk:

- 1) Hasil Usaha Kalurahan Bagi Hasil BUMDes/BUMDesma
- 2) Hasil Aset Kalurahan Pengelolaan Tanah Kas Desa

Investasi anggaran di bidang ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan secara berkelanjutan sehingga mendukung kemandirian fiskal Kalurahan.

d. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, Kalurahan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2.364.950.318,00. Anggaran tersebut digunakan untuk:

- 1) Administrasi Kependudukan Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa
- 2) Informasi Publik Pengembangan Sistem Informasi Desa
- 3) Pendidikan Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
- 4) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
- 5) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK//TPA/TKA/TPQ
- 6) Kesehatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Intensif, KB, dsb)
- 7) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

- 8) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Posyandu/Polindes
- 9) Infrastruktur Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)
- 10) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman
- 11) Pengembangan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa
- 12) Lingkungan Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah
- 13) Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah
- 14) Olahraga Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
- 15) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
- 16) Keamanan Dan Ketertiban Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa
- 17) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)
- 18) Budaya Pendataan Potensi Budaya Kalurahan
- 19) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
- 20) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)

Melalui pemanfaatan anggaran ini, Kalurahan berupaya mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan sesuai standar.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah Kalurahan Timbulharjo Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kalurahan Timbulharjo atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen RPMKal, RKPKal, serta Perjanjian Kinerja. Seluruh rangkaian perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, hingga evaluasi kinerja telah disusun dan dijalankan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, serta efisiensi, sebagaimana amanat Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kalurahan.

Secara umum, Pemerintah Kalurahan telah berupaya maksimal untuk mencapai 4 (empat) sasaran kinerja utama, yaitu: penurunan jumlah KK miskin, penurunan jumlah anak stunting, peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya tersebut diwujudkan melalui pemanfaatan anggaran yang terarah, kegiatan yang berbasis kebutuhan masyarakat, serta koordinasi lintas sektor yang terus diperkuat.

Berdasarkan hasil evaluasi pada tahun berjalan, beberapa sasaran kinerja mampu mencapai target yang telah ditetapkan, sementara beberapa lainnya masih memerlukan peningkatan upaya, inovasi, serta penguatan kolaborasi. Hal ini menjadi bahan pembelajaran sekaligus masukan strategis bagi Pemerintah Kalurahan Timbulharjo dalam perbaikan tata kelola, peningkatan kualitas layanan, dan efisiensi penggunaan anggaran di masa mendatang.

Laporan ini juga memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian output dan outcome yang dihasilkan oleh program dan kegiatan Kalurahan Timbulharjo selama satu tahun. Melalui penyusunan laporan ini, Pemerintah Kalurahan Timbulharjo berharap dapat memperkuat budaya kerja berorientasi hasil, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Sebagai penutup, Pemerintah Kalurahan Timbulharjo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kalurahan Timbulharjo sepanjang tahun 2025, baik dari unsur masyarakat, lembaga kemasyarakatan, Pemerintah Kapanewon, Pemerintah Kabupaten Bantul, maupun pemangku kepentingan lainnya. Harapannya, sinergi dan kolaborasi ini dapat terus ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya demi mewujudkan Kalurahan yang maju, mandiri, dan sejahtera.



Timbulharjo, 13 Maret 2026

LURAH,

Anif Arkham Haibar, S.Pd